

**INTERVENSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI NEGARA BUKAN ANGGOTA
STATUTA ROMA 1998
(STUDI KASUS PUTUSAN ICC NO: ICC-01/11-01/17)**

Takasya Angela Tanauw Khristanto

Hukum/Magister Ilmu Hukum

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

ABSTRAK

Tesis ini dibuat untuk mengetahui kewenangan *International Criminal Court* terhadap penyelesaian kasus hukum di negara bukan anggota Statuta Roma 1998 yang di teliti menggunakan Statuta Roma 1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970, dan contoh kasus yang sesuai. Dengan menggunakan teori keadilan hukum serta kepastian hukum Radburch dan teori konsep yang sesuai dapat disimpulkan intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court* terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Mayor Mahmoud Mustafa Busyaf Al-Werfalli di Libya dapat diterima karena *International Criminal Court* telah menerima *referral situation* dari Dewan Keamanan PBB yang dituliskan dalam *Resolution* 1970 Angka 4 dan 5 yang menyatakan seluruh pihak berwajib Libya wajib bekerja sama serta memberikan bantuan yang diperlukan oleh *International Criminal Court* dan Jaksa Penuntut. Menurut Pasal 13(b) dan 14 Statuta Roma 1998 *International Criminal Court* dapat melaksanakan yurisdiksinya jika telah tampak dilakukannya satu atau lebih kejahatan tersebut lalu diteruskan kepada Jaksa Penuntut

International Criminal Court oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. Intervensi yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pelaku kejahatan perang akan dihukum menurut Statuta Roma 1998 yang bersifat komplementer terhadap perundang-undangan dalam negeri yang telah ada serta berlaku sebelumnya. Kedaulatan Negara Libya tidak akan hilang dengan intervensi yang dilakukan oleh *International Criminal Court*. Selain memberi kepastian, intervensi dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan perang Al-Werfalli. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, Al-Werfalli harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai individu tanpa melihat jabatannya selama dilakukannya secara sadar meskipun karena ia menerima perintah dari atasannya. Libya yang belum mampu menangkap Al-Werfalli menunjukkan bahwa Libya *unable* menyelesaikan kasus tersebut. Selama Libya mampu menunjukkan tindakannya tidak *unwilling* dan/atau *unable* serta Libya sedang menyelidiki kasus yang sama dengan *International Criminal Court* serta tidak ada tindakan Libya yang menunjukkan akan memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan perang maka Libya memiliki hak untuk menolak proses hukum *International Criminal Court*.

Kata kunci : Kejahatan perang, *International Criminal Court*, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970

***THE INTERVENTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN
RESOLVING LEGAL CASE IN THE THIRD STATE OF ROME STATUTE***

1998

(CASE STUDY OF THE ICC DECISION NO: ICC-01/11-01/17)

Takasya Angela Tanauw Khristanto

Law/Master of Law

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out the authority of International Criminal Court in resolving legal cases in the third state of Rome Statute 1998 using Rome Statute 1998, UN Security Council Resolution 1970, and example cases. Using Radbruch's theory of legal justice, legal certainty, and concept; the conclusions are intervention carried out by the Court against war crimes committed by Major Mahmoud Mustafa Busyaf Al-Werfalli in Libya was acceptable because it had received a referral situation from Resolution 1970 Numbers 4 and 5 that states Libyan authorities are obliged to cooperate and provide assistance needed by the Court and Prosecutors. According Rome Statute 1998 Articles 13(b) and 14, the Court can exercise its jurisdiction if it appears one or more of such crimes have been committed then forwarded to the Prosecutor by UN Security Council acting under Chapter 7 of UN Charter. Intervention aimed to provide assurance that perpetrators of war crimes will be punished under Rome Statute 1998 which complementary to national criminal jurisdiction. The Libya's Sovereignty won't disappear with the intervention. Apart

from providing certainty, it was carried out to provide justice for the victims of Al-Werfalli's war crimes. Based on Rome Statute 1998 Article 25, Al-Werfalli must be held accountable for his actions as an individual regardless of his position as long as he does it consciously even though he received orders from his superiors. Libya hasn't been able to catch Al-Werfalli shows that Libya is unable to resolve the case. As long as Libya able to show that its actions aren't unwilling and/or unable and currently investigating the same case with the Court and no actions that show it will provide protection for perpetrators of war crimes, then Libya has the right to reject legal process.

Keywords : *War Crimes, International Criminal Court, United Nations Security Council Resolution 1970*

